

BAB V

KESIMPULAN IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi pada tahun 2010-2011. Selanjutnya untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemda. Tujuan terakhir adalah mengetahui pengaruh empiris pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemda. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan analisis regresi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda. Meningkatnya pendapatan asli daerah menyebabkan peningkatan kinerja yang dilakukan pemda provinsi. Sebaliknya kinerja pemerintah daerah provinsi cenderung menurun saat pendapatan asli daerah rendah. Seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah akan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah agar meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat.
2. Belanja modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja pemda. Ketika penggunaan belanja modal meningkat, maka kinerja pemerintah daerah cenderung menurun. Hal ini disebabkan, dalam realisasinya pemerintah daerah kurang tepat mengalokasikan belanja modal. Pemerintah daerah cenderung meningkatkan

belanja rutin dibandingkan belanja modalnya. Belanja modal yang tepat sasaran mengindikasikan tercapainya tujuan pembangunan dan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.

3. Tidak terdapat pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemda, ini menunjukkan ukuran daerah yang mengacu pada total aset pemerintah daerah belum berfungsi secara maksimal dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. Sebanyak apapun asset yang dimiliki daerah tidak mempengaruhi kinerja pemda sehingga total aset daerah tidak dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah.

B. Implikasi

1. Terkait dengan hasil yang dikemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah maka penelitian memberikan gambaran kepada pemerintah daerah memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga diperlukan peningkatan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan melalui sector pajak dan retribusi. Misalnya DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah provinsi menaikkan tarif retribusi parkir, menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (menaikkan nilai jual objek pajak), dan meningkatkan potensi pariwisata. Dari kinerja yang telah dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah di tahun 2010-2011.

2. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Semakin meningkatnya belanja modal, akan menurunkan kinerja pemerintah daerah. Rendahnya realisasi belanja modal akan memperlambat pembangunan infrastruktur di suatu provinsi. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah, mengalokasikan belanja modal untuk kepentingan public masih rendah efektivitasnya. Pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan belanja yang bersifat rutin dibandingkan belanja modal. Belanja rutin bersifat konsumtif, sedangkan belanja modal bersifat investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Pengalokasian belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah, melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga pengadaan barang inventaris dilakukan selektif sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kinerja Perangkat Daerah. Belanja modal yang efektif dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk fasilitas umum bagi masyarakat. Belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, misalnya dengan penyediaan fasilitas layanan pendidikan yaitu: pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas penunjang sekolah lainnya.
3. Ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran daerah, yang mengacu pada total aset tidak dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Total asset suatu daerah yang terlalu besar mengakibatkan pemerintah daerah sulit mengelola, memonitor dan mengawasi penggunaannya

secara langsung. Hal ini dapat diakibatkan oleh perbandingan luasnya daerah dengan jumlah pegawai pemerintah provinsi tidak sebanding di Indonesia. Dalam mengelola asset daerah, pemerintah daerah pemerintah daerah harus memperhatikan penganggaran dan kebutuhan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Jika pengelolaan asset daerah dilakukan dengan benar pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan manfaat asset bagi pemerintah daerah.

C. Saran Penelitian

Atas dasar keterbatasan tersebut maka peneliti mengajukan beberapa saran diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah:
 - a. potensi yang dimiliki daerah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga memiliki pendapatan asli daerah dan ukuran daerah yang besar. Pemda yang memiliki ukuran daerah dan pendapatan asli daerah yang besar seharusnya memiliki kinerja pemda yang baik. Namun jika sebaliknya pemda harus memperbaiki tata kelola pemerintahannya lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat.
 - b. Menurut penelitian ini, besarnya belanja modal tidak diimbangi dengan skor kinerja yang baik. Hal ini bisa disebabkan karena pemda meminimalisir porsi

belanja modal dibandingkan belanja rutin. Belanja modal sebaiknya ditingkatkan jumlahnya untuk pembangunan, pendidikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemda seharusnya dapat menentukan porsi belanja yang tepat sesuai kebutuhan daerahnya bukan keinginan pihak terkait.

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh kecil terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 39,9 %. Dengan demikian, 61,1% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel yang lain seperti misalnya dana alokasi umum, leverage, jumlah pegawai dan luas wilayah.
3. Penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa, sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian dengan tidak hanya menggunakan data provinsi tetapi kabupaten/kota serta menambah periode penelitian yang lebih panjang agar dapat digunakan untuk analisa jangka panjang. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sampel juga perlu diperhatikan sehingga sampel yang digunakan akan lebih banyak dan beragam agar dapat mewakili karakteristik populasi yang diteliti.